

**FIQH SIYASAH DAN PERMENDAGRI NO. 18 TAHUN 2018 TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA
TERHADAP MASA JABATAN KETUA RT DI DESA KETEGAN
KECAMATAN TANGGULANGIN KABUPATEN SIDOARJO**

SKRIPSI

Diajukan kepada

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Skripsi

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu

Ilmu Syari'ah dan Hukum



Oleh :

Muhammad Fatihul Khoiri

NIM C95216079

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam Prodi Hukum Tata Negara

SURABAYA

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Muhammad Fatihul Khoiri
NIM : C95216079
Semester : VIII
Fakultas/ Jurusan/ Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Publik Islam / Hukum Tata Negara
Judul Penelitian : **Tinjauan *Fiqh Siyasah* dan Permendagri No. 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa Terhadap Masa Jabatan Ketua RT Di Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo**

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 November 2020
Saya yang menyatakan,



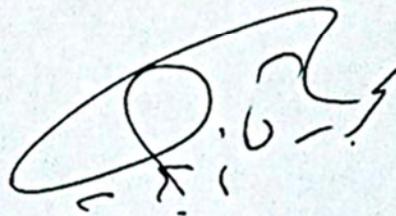
Muhammad Fatihul Khoiri
C95216079

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Fatihul Khoiri (C95216079) ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 20 Oktober 2020

Pembimbing,



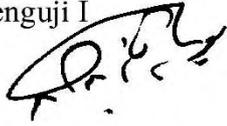
Dr. H. Suis, M. Fill. I
NIP. 196201011997031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Fatihul Khoiri, NIM C95216079 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, Tanggal 22 Desember 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Syari'ah.

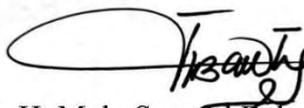
Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



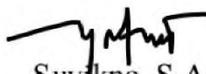
Dr. H. Suis, M.Fil.I
NIP.196201011997031002

Penguji II



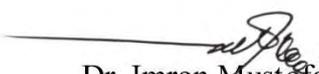
Dr. H. Moh. Syaeful Bahar, S.Ag., M.Si
NIP.197803152003121004

Penguji III



Suykno, S.Ag., MH.
NIP.197307052011011001

Penguji IV



Dr. Imron Mustofa, M.Ud
NIP.198710192019031006

Surabaya, 22 Desember 2020

Mengesahkan

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.

NIP.195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Fatihul Khoiri
NIM : C95216079
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum PublikIslam
E-mail address : mfatihul0@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**FIQH SIYASAH DAN PERMENDAGRI NO. 18 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA TERHADAP MASA
JABATAN KETUA RT DI DESA KETEGAN KECAMATAN TANGGULANGIN
KABUPATEN SIDOARJO**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Oktober 2021

Penulis


(*Muhammad Fatihul Khoiri*)

memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Membuat kualitas dan meningkatkan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, merencanakan, menjalankan, mempertahankan kelangsungan hidup dan memperluas hasil-hasil pengembangan yang bersifat partisipatif. Memajukan dan memobilisasi prakarsa, partisipatif dan juga swadaya gotong royong masyarakat, pemberdayaan dan penambahan kesejahteraan keluarga, proses hak politik masyarakat. RT menjadi struktur lembaga terbawah yang menjadi jujukan masyarakat. Fungsi ketua RT sangatlah penting, ketika terjadi konflik, percekocokan, kasus perceraian, sengketa dalam masyarakat, yang bertanggung jawab untuk menangani ialah ketua RT. Maka pemerintah mengatur Rukun Tetangga yang termasuk jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa ini dalam Permendagri No 18 Tahun 2018.

Mengenai makna pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa ialah bagian dari usaha mempertahankan nilai kehidupan masyarakat yang berasaskan gotong-royong dan kekeluargaan, sebagai upaya peningkatan keluwesan dalam melangsungkan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemsyarakatan, bagai usaha menggiatkan partisipasi segenap potensi swadaya masyarakat yang dapat mengikut-sertakan seluruh komponen yang diperoleh dalam mensyejahterakan masyarakat, sebagaimana usaha dalam rangka merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan yang menyokong terhadap masyarakat. Maksud dari pendirian suatu Lembaga Kemasyarakatan Desa ialah untuk teknik percepatan agar mewujudkan kesejahteraan dalam masyarakat

- b. Digunakan sebagai media dalam pengembangan potensi dan sumber daya oleh para peneliti dalam rangka memperdalam wawasan yang ada korelasinya dengan Hukum Tata Negara khususnya pada praktek Pemerintahan Desa, termasuk juga dalam ilmu khazanah keislaman yang berkaitan langsung dengan persoalan lembaga perwakilan.
2. Kegunaan praktis, yaitu:
 - a. Bagi lembaga legislatif khususnya anggota DPR, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam melakukan perumusan Undang-undang terkait agar sesuai dengan situasi dan kondisi sehingga produk undang-undang tersebut bisa berjalan secara efektif dan efisien.
 - b. Bagi Perangkat Desa, penelitian ini diharapkan mampu untuk menambah cakrawala keilmuan, maupun pertimbangan dan pedoman sehingga mereka bisa menjalankan amanat yang telah diberikan baik tugas dan fungsinya sebagaimana telah ditetapkan oleh Undang-undang secara khusus maupun nilai-nilai yang terdapat dalam ilmu keislaman.
 - c. Bagi masyarakat dan khalayak umum, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran untuk berpartisipasi dalam memantau perkembangan Desa masing-masing. Adapun masyarakat muslim khususnya, penelitian ini bisa dijadikan acuan dan parameter untuk mengukur sejauh mana Mekanisme

penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori. berisi tentang Permendagri dan Tinjauan *Fiqh Siyâsah*, dasar hukum, konsep yang berkaitan dengan masa pejabat publik.

Bab III Laporan Hasil. Berisi tentang deskripsi ketua RT laporan hasil data penelitian lapangan meliputi deskripsi lokasi penelitian dan mekanisme penerapan Permendagri tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa di tempatnya masing-masing sejalan dengan konsep *Fiqh Siyâsah*.

Bab IV berisi tentang analisis *fiqh siyâsah* terhadap penerapan pelaksanaan Permendagri, dalam masa jabatan ketua RT di Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.

Bab V Penutup. Merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan yang diperoleh untuk menjawab pokok-pokok permasalahan yang ada pada rumusan masalah serta saran dari penulis.

dia tidak memiliki kesempatan untuk mencari nafkah bagi keluarganya, maka dia berhak mendapatkan upah yang layak untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, tanpa berlebih-lebih dan korupsi. Lantaran, harta negara ialah milik umat muslim yang diamanatkan kepadanya, seperti halnya wali yatim yang diberi amanat untuk menjaga harta para anak yatim. Apabila dia berlebih-lebihan, boros, dan korupsi dari harta baitul mal, maka sama halnya dengan makan harta anak yatim.

- e) Hak memerintah selama mampu melaksanakan tugas imamah

Lain halnya seperti susunan kafir demokerasi dimana kalau membatasi masa jabatan pemimpin dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, yang selanjutnya bisa mencalonkan lagi. Syariah islam menentukan bahwa pemimpin menjabat selagi dia masih mampu melakukan tugas dan mewujudkan tujuan-tujuan dari imamah. Masa jabatan pemimpin bergantung pada mampu atau tidaknya mengaplikasikan fungsi dan maksud dari imamah. Jikalau pemimpin mampu melaksanakan dengan baik sampai akhir hayatnya, maka masa jabatannya ialah sampaila ia meninggal (seumur hidup). Mengenai ketidak mampuan untuk mewujudkan maksud dan fungsi dari imamah, maka pemimpin tersebut langsung diturunkan dari jabatannya, walaupun baru satu hari memegang jabatan.

2. Dasar Hukum Permendagri Nomor 18 tahun 2018
 - a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - c. Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

b. Kondisi geografis

- 1) Ketinggian tanah dari permukaan laut : 4 km
- 2) Topografi : dataran rendah
- 3) Suhu rata-rata : 30 s/d 32 derajat celcius

c. Jarak dari Pemerintahan desa

- 1) Ke Kecamatan : 3 km
- 2) Ke Kabupaten : 9 km
- 3) Ke Provinsi : 23 km

2. Data kependudukan

a. Jumlah Kepala Keluarga : 2367 KK

b. Adapun jumlah penduduk menurut jenis kelamin:

- 1) Laki-laki : 2525 jiwa
- 2) Perempuan : 2596 jiwa
- Jumlah : 5319 jiwa

Tabel 1.1

Laporan Tambahan Bulanan Februari Desa / Kelurahan

No	Rincian	Warga Negara RI		Orang Asing		Jumlah		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI & PEREMPUAN

Table 1.2

dalam pengelolaannya, tergantung desa masing-masing karena tiap desa tidak sama kebutuhannya. “Dibahas dan disepakati bersama antara BPD dan kepala desa masing masing,” ujarnya.

Menurut dia, tunjangan itu bisa menyemangati anggota BPD untuk bekerja membangun desanya masing-masing. Apalagi saat ini desa juga digerojok anggaran dari pusat yang diharapkan meningkatkan infrastruktur desa. “BPD memiliki peran untuk membantu kades,” ucapnya.

Sedangkan tunjangan untuk RT dan RW juga akan dikawal agar bisa diterima dengan baik. Namun, mekanisme penerimaan saat ini sedang dibahas. Melalui transfer ke APBDes atau rekening masing-masing. Kusman menegaskan, dalam waktu dekat pihaknya akan berkoordinasi dengan Bagian Pemerintahan Pemkab Sidoarjo terkait tindak lanjut dari tunjangan BPD, RT, dan RW. “Akan segera kita rapatkan karena kebutuhan tunjangan itu sangat dibutuhkan,” terangnya.

Ketua komisi A Taufiqulbar mengatakan, Komisi A sudah memperjuangkan tunjangan BPD dan perangkat desa lainnya. Misalnya, tunjangan BPD dikembalikan sesuai besaran awal. “Sempat protes, tapi sudah kita kawal dengan baik,” katanya.

Sama halnya dengan tunjangan RT dan RW di Sidoarjo. Jumlah RT dan RW juga harus dipastikan agar tunjangan tersebut bisa diterima dengan baik. Kinerja RT dan RW untuk bersinergi dengan desa sangat

nomor 5 tahun 2007, dimana masa jabatan ketua RT dibatasi sebanyak 2 periode, menurut beliau masyarakat pun juga tidak mengetahui batasan periode jabatan Ketua RT tersebut, sehingga bagi masyarakat kepemimpinan Bpk. M Sholeh yang dianggap baik sehingga terus dipercaya untuk tetap menjabat sebagai ketua RT.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti anak tangga dimulai dari peraturan tertinggi yang bersifat abstrak sampai yang terendah sebagai peraturan yang bersifat teknis, begitu juga dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, dimana adanya peraturan menteri tersebut dikeluarkan untuk mengatur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Dalam dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa jabatan ketua RT termasuk pengurus LKD berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan menteri dalam negeri No. 18 Tahun 2018 tentang Lembaga kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa didefinisikan sebagai berikut:

“Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa”

Sedangkan pada Pasal 6 Tentang Jenis LKD

1. Rukun Tetangga
2. Rukun Warga
3. Pemberdayaan kesejahteraan Masyarakat
4. Karang Taruna
5. Pos pelayanan Terpadu
6. Lembaga pemberdayaan Masyarakat

B. Analisa Permendagri No. 18 Tahun 2018 tentang Lembaga kemsayarakatan desa dan lembaga adat Desa Fiqh Siyasah Terhadap Masa Jabatan Ketua RT Di Desa Ketegan, Kabupaten Sidoarjo.

Indonesia adalah Negara Hukum dimana Dalam Konstitusi Negara yaitu dalam UUD 1945 pasal 3 Negara Indonesia adalah Negara Hukum, sehingga dalam menjalankan fungsi pemerintahan Hukum adalah sebagai peraturan tertinggi yang harus dipatuhi oleh seluruh warga Negara Indonesia, dimata Hukum semua masyarakat Indonesia berkedudukan yang sama dan sederajat.

Menganalisis kasus yang ada di Desa Ketegan Kabupaten Sidoarjo dimana Ketua RT yang menjabat lebih dari 2 periode memakai Hukum Indonesia adalah dengan memakai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemsayarakatan Dsea dan Lembaga Adat Desa dimana peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti anak tangga dimulai dari peraturan tertinggi yang bersifat abtark sampai yang terendah sebagai peraturan yang bersifat teknis, dimana adanya peraturan menteri tersebut dikeluarkan untuk mengatur Lembaga kemsayarakatan desa dan lembaga adat Desa.

metodenya. *Fiqh Siyasah* adalah pengetahuan yang otonom atau sekalipun bagian dari ilmu fiqh. Selanjutnya, Hasbi Ash Shiddieqy mengutarakan bahwasannya bahasan *ilmu fiqh* mencakup individu, masyarakat dan Negara, meliputi bidang-bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, kriminal, pradilan, acara pembuktian, kenegaraan dan hukum-hukum internasional, seperti perang, damai dan traktat. Objek *Fiqh Siyasah* menjadi luas, sesuai kapasitas bidang-bidang apa saja yang perlu diatur, seperti peraturan hubungan warga negara dengan lembaga negara, hubungan dengan negara lain, muslim dengan non muslim maupun dengan peraturan-peraturan lain yang dianggap penting oleh sebuah negara, setara dengan ruang lingkup serta kebutuhan negara tersebut.

Fiqh Siyasah adalah salah satu metode, tentunya dalam sebuah metode terdapat cabang-cabangnya, cabang dari *Fiqh Siyasah* antara lain:

- a. *Siyasah Dusturiyyah*
- b. *Siyasah Maliyyah*
- c. *Siyasah Qadla'iyyah*
- d. *Siyasah Harbiyyah*
- e. *Siyasah 'Idariyyah*

Dilihat dari permasalahan ataupun kasus yang etrjadi di RT Desa Ketegan Kabupaten Sidoarjo, untuk menganalisis kasus tersebut lebih tepatnya memakai *Siyasah Dusturiyyah*, Dikarenakan Pengertian dari *Siyasah Dusturiyyah* dari Kata “dusturi” berasal dari bahasa persia.

tanggal ditetapkan. Pengurus LKD dapat menjabat paling banyak2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Menganalisa dari penjelasan diatas bahwa jabatan ketua RT dalam satu periode adalah 5 tahun dan paling lama atau maksimal 2 periode secara berurutan ataupun secara tidak berurutan, sehingga dalam permendagri tersebut jelas ada batasan tentang masa jabatan ketua RT.

Melihat ketentuan dan aturan dalam Peraturan menteri dalam negeri No. 18 Tahun 2018 tentang Lembaga kemsayarakatan desa dan lembaga adat Desa dimana dalam aturan tersebut ketua RT masuk dalam jenis LKD, dan terdapat batasan masa jabatan yaitu 5 tahun dalam satu periode dan maksimal dua periode secara berturut turut ataupun tidak berurutan, tentunya jika menganalisis kasus yang terjadi di RT di desa Ketegan Kabupaten Sidoarjo dimana RT tersebut menjabat ketua RT selama 3 Periode tentunya menyalahi atau melanggar aturan dari Peraturan menteri dalam negeri No. 18 Tahun 2018 tentang Lembaga kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa tersebut, dan tentunya bisa dikatakan bahwa RT tersebut menyalahi aturan.

Adanya Permendagri No. 18 Tahun 2018 tentang Lembaga kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa tersebut untuk mengatur dan memberikan ruang bagi masyarakat yang ingin menjabat atau mengabdikan dirinya dalam ruang lingkup LKD,

sehingga kejadian yang terjadi di Desa Ketegan Kabupaten Sidoarjo tersebut selain melanggar atau bertentangan terhadap Peraturan menteri dalam negeri No. 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa juga tidak memberikan peluang terhadap orang lain untuk mencalonkan diri menjadi RT tersebut.

Dalam konteks Islam pemilihan Ulil Amri tidak ada batasan dalam periodenya selama yang bersangkutan masih di cintai Rakyatnya dan masih memegang asas keadilan, sehingga jika menganalisis memakai *Siyasah Dusturiyyah*, terpilihnya kembali pada periode ke 3 menunjukkan bahwa yang bersangkutan masih di percaya masyarakat dan masih menjalankan amanahnya atas asas keadilan dalam melaksanakannya.

- Mustofa, Imron. *Pendidikan Islam Sebagai Institusi Politik Demokrasi Tertinggi di Indonesia. Halaqa: Islamic Education Journal*. Vol. 1 no. 1, 27-42, 2017.
- , *Jendela Logika Dalam Berfikir; Deduksi dan Induksi Sebagai Dasar Penalaran Ilmiah. El-Banat: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*. Vol 6. No 2, 1-21, 2006.
- Parizon. “*Tinjauan Fiqh Siyâsah Terhadap Penerapan Demokrasi Dalam Pemilihan RT di Kelurahan Tanjung Kupang*” (skrpisi--UIN Raden Intan, Banten, 2019)
- Prodjodikiro, Dr. Wirjono. *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik*. Bandung: PT Eresco, 1971.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, cet V, 22-25, 2009.
- Sunarto, Ahmad. *Kamus Al-Fikr Arab-Indoneisa-Inggris & Indonesia-Arab-Inggris*. Rembang: Halim Jaya, 2012.
- Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi IV*. Yogyakarta: Rineka Cipta, cet. XI, 39, 2017.
- Ubaidillah, M. Hasan. *Dasar-dasar Ilmu Pemerintahan*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, cet XII, 5-7, 2018.